

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badan Pemeriksa Keuangan RI, 1993, *Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal BPK RI.
- Hans Kalsen, 2007, *Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi : Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : KPK.
- Manafe, A. L. 2016. *Analisis Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.14/PID.SUS-TPK/2014/PN.Yyk*. Tesis Magister Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mardalis, 2004, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim dan Syahrums, 2011, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citapustaka Media.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, 2014. Depok: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekamto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soeroro, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.

Tuanakotta, Theodorus M. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara: Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat.

Yunto, E., Illian D. A. Sari, J. Limbong, R. R. Bakar, dan F. Ilyas. 2014. “*Hasil Penelitian: Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*.” Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2023 Tentang BPKP.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 Tahun 2012

Jurnal:

- Astuti, A. dan Chariri, A. 2015. *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi*. Diponegoro Journal of Accounting. Volume 4 nomor 3 tahun 2015. Halaman 1-12. ISSN: 2337-3806.
- Lonna Yohanes Lengkong, 2023, *Urgensi Penerapan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Tora: 9 (3), hlm. 359, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/376740703_Urgensi_Penerapan_Pemerasan_Aset_Dalam_Tindak_Pidana_Pencucian_Uang, diakses pada tanggal 03 Juli 2024.
- Suhartini, 2019 *Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara*, Jurnal De Jure Vol. 11 No. 2, Jakarta.
- Yosephine Elizabeth, Inri Januar, dan Lonna Yohanes Lengkong, 2023, “*Analisa Putusan Hakim Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*”, Honeste Vivere Journal, Vol. 33, Issue. 2, hlm. 78 terdapat dalam <https://ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/view/197/79>, diakses pada tanggal 03 Juli 2024.